



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 90 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Negara Cq. Kementerian Agama R.I. pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dilaporkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian/Penilaian Barang Yang Akan Dihapus Tanggal 11 Desember 2013, Keterangan Pemeriksaan Teknis Kendaraan dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Tapin Nomor AJ.402/50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64/DIS. HUB/2013 Tanggal 11 Nopember 2013, Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin Nomor S-18/MK.06/WKN.12/KNL.03/2014 Tanggal 23 Mei 2014 dinyatakan telah rusak;
  - b. bahwa barang milik negara c.q. Kementerian Agama R.I. yang telah dinyatakan rusak sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk dapat dihapuskan dari daftar barang milik negara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

l

2. Peraturan...

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:..

l

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TAPIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.**

KESATU : Menetapkan Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Memberi kuasa kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kebenaran materiil atas jenis, jumlah, tahun dan nilai limit barang yang akan dilelang menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang;
2. Berdasarkan keputusan penghapusan ini, daftar barang yang akan dihapus harus dikeluarkan dari Laporan Barang Kuasa Pengguna;
3. Barang Milik Negara yang akan dihapus, dijual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat dan hasil penjualannya disetorkan ke rekening kas umum negara; dan
4. Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penjualan secara lelang dan pelaksanaan penghapusan barang kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama tembusan ke KPKNL dengan dilampiri salinan risalah lelang, salinan Keputusan Penghapusan, *fotocopy* bukti setor ke rekening kas umum negara, laporan barang kuasa pengguna dan asli berita acara serah terima barang tersebut.

KETIGA : Kepala Biro Keuangan dan BMN menindaklanjuti keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juni 2014

**a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,**



**NUR SYAM**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 90 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
 PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TAPIN  
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	NAMA BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	KODE BARANG	NUP	MERK/TYPE	JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN	NILAI			KONDISI
							PEROLEHAN	BUKU	LIMIT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mini Bus	3.02.01.02.003	1	Merk/Type : Toyota Kijang KF 80	1	1999	77.890.000	-	25.000.000	RB
2	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	4	Merk/Type : Suzuki A 100 X	1	1996	2.500.000	-	864.000	RB
3	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	3	Merk/Type : Suzuki A 100 X	1	1996	2.500.000	-	864.000	RB
4	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	6	Merk/Type : Suzuki RC 100	1	1996	1.980.000	-	864.000	RB
5	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	5	Merk/Type : Suzuki A 100 X	1	1996	1.062.500	-	960.000	RB
6	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	1	Merk/Type : Suzuki A 100 X	1	1996	2.300.000	-	920.000	RB
7	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	2	Merk/Type : Suzuki A 100 X	1	1996	2.100.000	-	920.000	RB
8	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	7	Merk/Type : Suzuki A 100 X	1	1997	2.650.000	-	1.122.000	RB
9	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	17	Merk/Type : Suzuki RC 100	1	1997	1.850.000	-	700.000	RB
10	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	8	Merk/Type : Honda GLP II	1	1997	6.200.000	-	935.000	RB
11	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	9	Merk/Type : Honda Astrea C 86	1	1999	3.050.000	-	850.000	RB
12	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	10	Merk/Type : Honda GLM II	1	2000	7.050.000	-	1.500.000	RB

NO	NAMA BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	KODE BARANG	NUP	MERK/TYPE	JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN	NILAI		KONDISI	
							PEROLEHAN	BUKU LIMIT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	13	Merk/Type : Honda NF 100 D	1	2001	5.000.000	-	1.500.000	RB
14	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	12	Merk/Type : Honda NF 100 D	1	2001	4.900.000	-	1.500.000	RB
15	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	15	Merk/Type : Honda Kirana ND	1	2004	6.900.000	-	1.500.000	RB
<b>Jumlah</b>					<b>15</b>		<b>127.932.500</b>	<b>-</b>	<b>39.999.000</b>	

hal. 2.2

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,



NUR SYAM